

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan bermasyarakat bergantung dan selalu terikat dengan pemerintahan sebagai landasan dalam memenuhi kebutuhan lebih baik dan mencapai kemakmuran serta ketenangan hidup. Setiap desa pasti memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih maju. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sehingga mampu menjalankan kehidupan secara mandiri dan terbebas dari jeratan kemiskinan.

Kemiskinan biasanya terjadi karena tidak mampu seseorang memberdayakan potensi diri secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan secara mandiri. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat Indonesia tidak hanya masalah kecerdasan, tetapi masalah keahlian hidup, karena keahlian dapat membuat masyarakat menjadi survive dalam menjalani hidup dan mencapai apa yang mereka inginkan. Tanpa keahlian hidup mereka tidak akan mendapatkan peluang untuk memenangkan perlombaan hidup yang semakin keras. Maka dari itu negara melalui pemerintah desa menyiapkan strategi-strategi pemberdayaan masyarakat seperti dalam bidang perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang perindustrian. Ini mendukung masyarakat untuk menemukan peluang dalam menjalankan usaha secara mandiri dan terjauh dari kata kemiskinan.

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang menjelaskan cara dan upaya untuk memperkuat posisi seseorang dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kemampuannya dalam mengidentifikasi persoalan serta mencari solusinya. Dengan kata lain, dalam melakukan pemberdayaan sejatinya harus melibatkan masyarakat yang diberdayakan ¹

¹ Kebudayaan Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi PT," *Rineka Cipta: Jakarta*, 2009.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi tentang pengelolaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimana Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami revisi melalui UU Nomor 3 Tahun 2024. UU Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UUNomor 6 Tahun 2014. UU ini mulai berlaku pada 25 April 2024.

Salah satu fokus utama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal. Potensi lokal yang ada diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi melalui berbagai kegiatan swadaya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat sendiri sesungguhnya bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan peningkatan dan kuatnya potensi masyarakat agar lebih berkualitas, karena setiap daerah memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan akan membantu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus melepaskan diri dari keterbelakangan serta ketergantungan itu sendiri.

Pemberdayaan di desa Ladara gencar dilakukan tiap tahunnya dengan membagi masyarakat dalam tiga kelompok yakni kelompok perikanan, kelompok peternakan dan kelompok perindustrian. Dimana masing – masing masyarakat bebas memilih kelompok mana yang ingin ia kembangkan dalam usaha pemberdayaan desa. Namun pada penyaluran dana bantuan modal tersebut adanya kejanggalan dan tidak transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, adapun beberapa masyarakat yang diketahui mendapatkan dana langsung berupa uang tunai bukan barang sesuai dengan kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan yang peneliti dapat mengenai program pemberdayaan masyarakat di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara terlihat tidak sesuai dengan yang direncanakan dengan yang terealisasi dimasyarakat serta adanya ketertutupan pemerintah desa terkait anggaran yang dibelanjakan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara?
2. Apa saja penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat tersebut?
3. Bagaimanakah keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mengubah perekonomian di desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara?

1.3 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi pembahasan dan penelitian ini pada efektivitas program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan perekonomian melalui kelompok peternakan, kelompok perikanan dan kelompok perindustrian di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat pada penelitian ini, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat yang telah direalisasikan di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam terlaksanannya program pemberdayaan masyarakat di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.
- c. Mengukur tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian warga di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian – penelitian yang lebih dalam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat diharapkan menjadi pertimbangan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat guna tercapainya tujuan peningkatan perekonomian.
- 2) Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan kebijakan – kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang serta sebagai penerapan keilmuan terkait program pemberdayaan masyarakat.
- 3) Bagi penulis diharapkan dapat memenuhi tugas akhir dengan baik dan menambah wawasan terkait efektivitas pemberdayaan masyarakat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian

Dalam penelitian tentunya setiap tindakan perlu dilandaskan dengan teori, begitu pun dengan penelitian ini disusun kerangka teori sebagai padoman dalam menyelesaikan penelitian.

2.1.1 Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara umum Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) ²

Berdasarkan pengertian di atas bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuantujuan tersebut.

Efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya³.

² A G Bedeian and R F Zammuto, *Organizations: Theory and Design*, Wiley Series, New Technologies And (Dryden Press, 1991), <https://books.google.co.id/books?id=xRsdKne02BwC>.

³ Sondang P Siagian, “Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2002 hal. 24.

Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

b. Ukuran Efektivitas

Dalam hal program pemberdayaan masyarakat mestilah diukur dari segi efektivitas dan efisiensi tercapainya target pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat yang buruk pengelolaannya tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat bahkan lebih parahnya lagi dapat menghabiskan anggaran – anggaran yang mestinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah desa juga perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat penerima program pemberdayaan masyarakat baik itu secara pribadi maupun pelatihan agar masyarakat dapat mengelola amanah dari pemerintah desa sehingga tidak terjadi keborosan anggaran. Budiani (2007: 52) mengemukakan empat indikator untuk mengukur efektivitas suatu program, yaitu:

- Ketepatan sasaran program

Dalam konsep Budiani (2007:53) menjelaskan bahwa “ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya”. Suatu program diciptakan memiliki tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang ada pada indikator ketepatan sasaran program yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas program pemberdayaan di Desa Ladara

- Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait program pemberdayaan dalam melakukan sosialisasi tersebut, sehingga

informasi program pemberdayaan dapat tersampaikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

- Tujuan program

Tujuan merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai dalam pelaksanaannya. Berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007:53) pada indikator pencapaian tujuan program yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Pemantauan program

Pemantauan merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada program pemberdayaan, dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya program ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu.

Menurut Budiani, keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi suatu program pemberdayaan masyarakat atau program-program sosial lainnya. Efektivitas dilihat dari seberapa tepat sasaran program, seberapa baik sosialisasi dilakukan, seberapa sesuai hasil dengan tujuan program, serta seberapa baik pemantauan program dilakukan oleh penyelenggara.

Selain dari pendekatan diatas adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidaknya yaitu:

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini untuk mengarahkan aparat dan masyarakat untuk mencapai sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan dari setiap program.
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan, ini merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana jalan yang dipilih dalam upaya tercapainya sasaran-sasaran suatu program.
- Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di

tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan dimasa yang akan datang.
- Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka program tersebut tidak akan mencapai sarannya.
- Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.2 Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.

Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan mengendalikan hidup mereka sendiri. Pemberdayaan sering kali melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri,

sehingga individu atau kelompok dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Dalam konteks sosial, pemberdayaan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Misalnya, dalam pemberdayaan ekonomi, individu atau kelompok diberikan akses ke pelatihan keterampilan, modal usaha, atau informasi pasar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan dalam pemberdayaan sosial, fokusnya adalah pada peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap layanan publik.

Konsep pemberdayaan berasal dari perkembangan pemikiran dan budaya Barat, terutama Eropa, yang muncul pada tahun 1970-an dan terus berkembang sejak itu. Pada akhir dekade 1960-an, para pakar mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada tujuan pembangunan lainnya, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Terdapat negara-negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan, dan Afrika Selatan, di mana, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, masalah-masalah terkait perkembangan yang tidak sesuai dengan harapan muncul, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan dampak yang diharapkan⁴.

Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment merujuk pada kata "Power" (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, konsep dasar dari pemberdayaan berhubungan erat dengan gagasan tentang kekuasaan, seperti yang diungkapkan oleh Suharto⁵. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk mengarahkan tindakan orang lain sesuai dengan keinginan pribadi, tanpa memperhatikan keinginan dan minat mereka. Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah kemampuan individu atau kelompok yang rentan dan lemah untuk:

⁴ I R Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas: (Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis)* (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=jbjOwAACAAJ>.

⁵ Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009 hal. 60.

- Memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat merasakan kebebasan, bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit.
- Mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang serta jasa yang diperlukan.
- Terlibat dalam proses pembangunan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. (Suharto, 2009 ; Abidin, 2013).

Pemberdayaan menurut (Mc Ardle, dikutip dalam Harry Hikmat) adalah proses di mana individu secara konsisten membuat keputusan dan memastikan pelaksanaannya. Ketika mencapai tujuan bersama, individu diberdayakan melalui kemandirian, merasa bertanggung jawab untuk terus meningkatkan diri dengan usaha sendiri, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Semua ini bertujuan mencapai target tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pihak eksternal.

Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai upaya yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan mereka dan mencapai tujuan mereka. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan mereka bekerja secara mandiri serta memberikan dukungan kepada diri sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu empowerment. Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan empowerment dalam 2 (dua) arti yaitu:

- To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
- To give power of authority to, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

b. Dilema pemberdayaan Masyarakat

Meskipun nampaknya telah terdapat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, tetapi Aditya (2003), mengungkapkan beragam dilema dalam pelaksanaannya. Pertama, harus diakui bahwa sejak awal 1990-an, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan (*alleviation poverty and poverty reduction*).

Upaya ini dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. Di satu sisi, kemiskinan dipandang sebagai keadaan yang absolut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan diseragamkan lalu dipakai sebagai dasar menyusun proyek pengentasannya. Pada kenyataannya kemiskinan memberikan wajahnya yang relatif. Kemiskinan juga menyangkut bagaimana kondisi sosial mendefinisikannya. Seseorang bisa jadi tidak miskin dalam kehidupan komunitas kultural dan geografis tertentu meski secara absolut ia didefinisikan sebagai miskin. Artinya upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhadapan dengan kenyataan yang pasti.

Kedua, berkaitan dengan relativitas dalam mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan merupakan masalah tersendiri, karena keberhasilan sendiri masih diperdebatkan dalam konteks teknis atau substantif. Evaluasi proyek pemberdayaan hampir selalu dilakukan dengan mengukur keberhasilan yang menyangkut bagaimana sebuah program dilaksanakan serta bagaimana anggaran yang direncanakan dapat diimplementasikan namun sering luput melihat sisi substansial dari tujuan pemberdayaan itu sendiri. Sementara itu di lain pihak substansi pemberdayaan sendiri terus diperdebatkan menyangkut pemahaman akan masyarakat yang berdaya dan siapa yang mendefinisikannya.

Ketiga, bentuk-bentuk upaya pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan seringkali justru tidak menjawab masalah ketidakberdayaan itu. Pemberian bantuan yang biasanya berupa sejumlah dana sebenarnya justru membuat upaya pemberdayaan melahirkan ketergantungan baru. Sekalipun bentuk bantuan yang diberikan sebenarnya ditujukan sebagai pemicu bangkitnya keberdayaan namun seringkali melahirkan mentalitas penerima, bukan penggerak dalam masyarakat yang menjadi sasarannya

Keempat, menyangkut keberlanjutan program/kegiatan. Di satu pihak, banyak program/kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu dimana masyarakat sasaran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan yang dilakukan, ternyata tidak terjaga keberlanjutannya. Di lain pihak, pemberdayaan yang oleh organisasi di luar pemerintah mencoba menjawab masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang menyatakan perlunya membangun penguatan kesadaran kritis dalam masyarakat dalam bentuk kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi. Dalam kondisi tertentu upaya ini mampu menjawab problem ketergantungan namun dalam kondisi yang tertentu pula upaya ini menjadi lambat bergerak.

Kelima, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. Artinya masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri.

Keenam, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena yang cukup menarik. Banyak pihak coba dilibatkan untuk menjalin kerjasama mewujudkan keberdayaan. Namun program ini akan menjadi sia-sia kalau masing-masing pihak tidak berada dalam kapasitas yang setara. Dominasi akan membuat kerjasama menjadi timpang, konsensus tidak terwujud dalam keadilan, dan kenyataannya sangat sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama.

Ketujuh, isu globalisasi, menghadapkan negara tentang pentingnya pasar dan ada upaya-upaya untuk menyusutkan peran negara. Padahal, ketidakberdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan baru dimana negara hanya akan menjadi penonton saja.

Kritik Pierre Bourdieu atas paham ini menyebutkan bahwa dunia akan berada dalam kondisi sebagaimana gambaran teori Darwin tentang seleksi alam

(the survival of the fittest) dimana yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya. Pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedelapan, dalam konteks Indonesia, negara kesejahteraan (welfare state) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para Dilema yang dihadapi bangsa Indonesia adalah karena kita punya konsepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya.

2.1.3 Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki ikatan sosial yang terorganisir. Masyarakat dibentuk oleh berbagai elemen, seperti nilai-nilai, norma, budaya, serta struktur sosial yang mengatur hubungan antar anggotanya. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat juga dapat mencakup berbagai kelompok dan komunitas yang memiliki kepentingan, tujuan, dan identitas bersama. Masyarakat berfungsi sebagai wadah bagi individu untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan memenuhi kebutuhan sosial mereka.

Menurut Koentjaraningrat (2009), masyarakat, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "society" berasal dari kata Latin "socius," yang artinya kawan. Dalam bahasa Arab, istilah "syaraka" mengandung makna "ikut serta" dan "berpartisipasi". Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Karl Marx, di sisi lain, mengartikan masyarakat sebagai struktur yang mengalami ketegangan organisasi dan perkembangan karena terdapat pertentangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang kemudian terpecah. Terdapat beberapa unsur penting dalam konsep masyarakat:

- Terdapat sekelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Kehidupan bersama ini bukan insidental atau spontan, melainkan untuk keberlangsungan jangka panjang.
- Terdapat kesadaran di kalangan anggota masyarakat tentang kesatuan mereka, yang tercermin dalam solidaritas dan budaya bersama yang menghubungkan mereka satu sama lain.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal bersama, berinteraksi, dan

menjalin hubungan sosial berdasarkan kesamaan budaya, identitas, lokasi geografis, dan warisan tradisional. Hal ini menciptakan ikatan kesamaan yang menggabungkan mereka dalam suatu sistem sosial. Ada beberapa karakteristik masyarakat yaitu:

- **Interaksi Sosial:** Masyarakat terbentuk melalui interaksi antara individu. Interaksi ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi, kerjasama, dan konflik.
- **Struktur Sosial:** Masyarakat memiliki struktur yang terorganisir, yang mencakup berbagai lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Struktur ini membantu mengatur hubungan antar individu.
- **Norma dan Nilai:** Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang dipegang bersama. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku individu, sedangkan nilai adalah keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat.
- **Budaya:** Masyarakat memiliki budaya yang mencakup bahasa, seni, adat istiadat, dan tradisi. Budaya ini menjadi identitas masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- **Keterikatan Wilayah:** Masyarakat biasanya terikat pada suatu wilayah geografis tertentu, meskipun dengan perkembangan teknologi, interaksi antarindividu dapat terjadi tanpa batasan geografis.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016) juga mendefinisikan pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan

keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya⁶.

Sedangkan dari sisi manajemen secara filosofis, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai fokusnya. Dimana harus dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, mulai dari tingkat komunitas terbawah diberikan peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia, sebab, program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Kemandirian disini yaitu tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun, memelihara kelangsungan hidupnya dan berpartisipasi menjaga lingkungan dimana mereka berada. Jadi secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupannya.

b. Peran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berperan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Mardikanto, dkk (2014), menjelaskan peran dari pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :

⁶ Jim Ife and Frank Tesoriero, "Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008 hal. 265.

- Perbaikan kelembagaan (Better Institution). Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
- Perbaikan Usaha (Better Business). Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
- Perbaikan Pendapatan (Better Income). Perbaikan bisnis diharapkan dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. Sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal penerimaan keuangan masyarakat.
- Perbaikan Lingkungan (Better Environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- Perbaikan Kehidupan (Better Living). Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik.
- Perbaikan Masyarakat (Better Community). Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula, sehingga dibutuhkan perbaikan masyarakat.

c. Program-program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Desa Ladara telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat menjadi tiga kelompok yakni :

- Perikanan

Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi yang

dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual.

- **Peternakan**

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen pada faktor – faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.

- **Perindustrian**

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Sandi (2010:148) industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Purnami Wulandari, dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga” penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan sapu gelagah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Perbedaan dari penelitian yang penulis angkat ialah tempat melakukan penelitian dan variabel yang digunakan dalam

penelitian yakni pemberdayaan masyarakat melalui peternakan, perikanan dan perindustrian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nilamsari dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara” penelitian ini pada tahun 2010 menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) melalui pelatihan komputer. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada lokasi dan fokus penelitian yang berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rismanadya Rahmah dan Tri Joko Raharjo yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kampung” penelitian ini pada tahun 2024 menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat masyarakat dalam pengembangan desa wisata kampung untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan Rosmiyani (2018) mahasiswa program strata 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul “Efektifitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus KUBE Desa Margomulyo Kec. Air Nanningan Kab. Tanggamus). Hasil penelitian ini adalah Efektifitas program KUBE di Desa Margomulyo hanya memenuhi 2 ukuran efektifitas yaitu ketepatan sasaran dan tujuan program. Program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin hanya 1 indikator yang belum tercapai yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah. Pandangan Ekonomi Islam mengenai KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya memenuhi nilai keadilan dan Takaful (jaminan sosial). Persamaan Penelitian ini Yaitu sama-sama menggunakan indikator efektifitas dari Ni Wayan Budiani, bedanya penelitian ini membahas tentang seberapa efektif Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin sedangkan penelitian ini membahas tentang seberapa efektif pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi yang ada di dalam sebuah kelompok wanita tani selain itu tempat penelitian juga berbeda.

Hasil Penelitian Terdahulu		
Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
<p>Metode Penelitian: Semua penelitian menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam tentang pemberdayaan masyarakat. Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat: Keempat penelitian berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, meskipun dengan pendekatan dan objek yang berbeda. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan: Semua penelitian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pelatihan, pengembangan ekonomi, maupun program-program tertentu.</p>	<p>Penelitian Ayu Purnami Wulandari berfokus pada pembuatan sapu gelagah. Penelitian Nilamsari berfokus pada pelatihan komputer dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Penelitian Rismanadya Rahmah dan Tri Joko Raharjo berfokus pada pengembangan desa wisata. Penelitian Rosmiyani berfokus pada efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam konteks ekonomi Islam. Indikator dan Ukuran Efektivitas: Penelitian Rosmiyani menggunakan indikator</p>	<p>Keempat penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tema yang penting dan relevan dalam konteks peningkatan kesejahteraan. Meskipun memiliki fokus dan lokasi yang berbeda, semua penelitian berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana berbagai program dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perbedaan dalam objek dan pendekatan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung pada kebutuhan dan konteks lokal. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi</p>

	<p>efektivitas dari Ni Wayan Budiani, sedangkan penelitian lainnya tidak menyebutkan indikator yang sama.</p>	<p>hubungan antara berbagai pendekatan pemberdayaan dan hasil yang dicapai, serta bagaimana indikator efektivitas dapat diadaptasi untuk berbagai program.</p>
--	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

